

**PENGAWASAN KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE A KOTA DUMAI
TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG BERDASARKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-
53/BC/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IIN KUMIRA SARI
10927006527

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota Dumai terhadap penyeludupan barang berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai. Adapun masalah yang penulis teliti pada kegiatan ekspor impor ini masih banyak terjadinya penyeludupan barang. dimana yang berwenang mengawasi kegiatan ekspor dan impor adalah lembaga bea cukai. dan pengawasan yang efektif dapat mengurangi penyeludupan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Dumai belumlah efektif dan sesuai dengan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-53/Bc/2010. Tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai.

Lokasi penelitian yakni kantor bea dan cukai Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota Dumai terhadap penyeludupan barang berdasarkan peraturan direktur jenderal nomor P-53/Bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai. dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota Dumai terhadap penyeludupan barang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis, populasinya adalah karyawan kantor bea cukai tipe A kota Dumai yang berjumlah 101 orang .penulis mengambil sampel sebanyak 25 % yaitu 25 orang dan untuk memperkuat data yang diperoleh penulis mewawancarai 5 orang tokoh masyarakat yang mengetahui tentang bea dan cukai Dumai. Dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer, data sekunder. Alat pengumpul data adalah observasi, angket, wawancara, dan kajian pustaka. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh bea dan cukai tipe A kota Dumai yaitu pengawasan internal (pengawasan dari dalam), dan pengawasan eksternal (pengawasan dari luar). dan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah batas batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo (pelabuhan Indonesia), pintu masuk dan keluarnya barang, dan kurangnya armada patoli. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengawasan internal dan eksternal belumlah terwujud secara efektif. Ini dikarenakan batas-batas pabean yang belum jelas, pintu masuk dan keluarnya barang, dan kurangnya armada patroli yang melakukan patroli.

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Bawahan Atau Personel Bea Cukai | 43 |
| Tabel 2 | Tanggapan Responden Tentang Adanya Sanksi Dari Atasan Apabila Bawahan Tidak Melakukan Tugasnya Secara Optimal | 44 |
| Tabel 3 | Sanksi yang Biasanya Diberikan Apabila Bawahan Tidak Melakukan Tugasnya Secara Optimal | 45 |
| Tabel 4 | Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Yang Dilakukan Dilapangan atau Di Perairan Dumai | 46 |
| Tabel 5 | Tanggapan Responden Berapa Kali Patroli Dilakukan Oleh Bea dan Cukai Kota Dumai | 47 |
| Tabel 6 | Tanggapan Responden Tentang Banyaknya Pelanggaran Di Laut Dumai | 48 |
| Tabel 7 | Tanggapan Responden Tentang Batas-Batas Pabean Yang Ditetapkan Oleh Pelindo | 50 |
| Table 8 | Tanggapan Responden Dalam Mengawasi Pelabuhan Yang Batas-Batas Pabeannya Kurang Jelas | 50 |
| Table 9 | Tanggapan Responden Tentang Batas-Batas Pintu Masuk dan Keluarnya Barang Dari Indonesia | 52 |
| Table 10 | Tanggapan Responden Dalam Mengawasi Perairan Yang Pintu Masuk Dan Keluarnya Barang Belum Jelas | 52 |
| Table 11 | Tanggapan Responden Tentang Jumlah Pejabat Bea Cukai yang Melakukan Patroli | 54 |
| Table 12 | Tanggapan Responden Banyaknya Pelabuhan yang Harus Diawasi, Sementara Armada Patroli Kurang | 55 |

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai terhadap Penyeludupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.”** Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Teristimewa untuk Ibunda Mirawati dan Ayahanda Ramli tercinta yang telah membesarkan dan mendidik ananda selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada ananda.
2. kakakku tersayang, Endang Kumirasari Spd, dan abang-abangku Upi hamdani, Rivi candra, Kurniawan, Adri gunawan, dan Adik-adik ku M.zaki, M.Rizki Saputra, Siti aisyah, dan Indah kumirasari, terima kasih untuk motivasi dan doa yang telah diberikan.
3. Bapak Prof.Dr.M.Nazir selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta pembantu rektor.
4. Bapak Dekan Dr.H.Akbarizan,MA.M.Pd beserta pembantu dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Nuraini sahu, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Magfirah ,M.Ag.
6. Bapak Muhammad Kastulani, SH, MH selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk pihak bea cukai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat penulis puguh faluvi kurniadi, dewi fitri maya sari, dewi Fatimah, fauziah lisdiana, sidratul khairani, dan susanti haryani, Sriwahyuni, serta rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/i Ilmu Hukum khususnya IH 2 Terima kasih atas doa dan dukungan untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Oktober 2013

IIN KUMIRA SARI
10927006527

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Batasan masalah | 9 |
| C. Rumusan masalah | 9 |
| D. Tujuan penelitian | 9 |
| E. Manfaat penelitian | 10 |
| F. Metode penelitian | 10 |
| G. Sistematika penulisan | 14 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 16 |
| A. Gambaran Umum Kota Dumai..... | 16 |
| 1. Keadaan geografis | 17 |
| 2. Pemerintahan kota Dumai | 18 |
| 3. Penduduk kota Dumai | 17 |
| B. Gambaran Umum Bea Cukai Kota Dumai dan Pelabuhan Pelabuhan dibawah pengawasan bea dan cukai kota Dumai... | 19 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. Pengertian pengawasan..... | 23 |
| B. Tujuan pengawasan | 26 |
| C. Teknik pengawasan | 27 |
| D. Manfaat pengawasan | 34 |
| E. Pengawasan internal | 35 |
| F. Pengawasan eksternal | 37 |
| G. Pengawasan pabean | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Pengawasan Kantor Bea dan cukai Terhadap Penyeludupan berdasarkan peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/bc/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengawasan Internal | 42 |
| 2. Pengawasan Eksternal | 45 |
| B. Faktor Penghambat Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyeludupan Barang di Dumai | 49 |
| 1. Batas-batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo (pelabuhan Indonesia)..... | 49 |
| 2. Pintu masuk dan keluar barang yang belum menjadi Patokan oleh pelindo (pelabuhan Indonesia)..... | 51 |
| 3. Kurangnya armada patroli yang ada di kantor bea Cukai tipe A kota Dumai dalam melaksanakan Pengawasan terhadap perairan dan pelabuhan-pelabuhan yang melaksanakan kegiatan ekspor impor | 53 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran-saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan bantuan dari Negara-negara maju untuk membangun Indonesia dibidang ekonomi dan perdagangan luar negeri. Karena Indonesia salah satu Negara yang menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*).

Organisasi internasional dalam pengertiannya adalah organisasi yang dibentuk dengan suatu perjanjian dengan tiga negara atau lebih yang merupakan pihak-pihak. Suatu organisasi hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menurut hukum dipisahkan dari setiap organisasi lainnya dan terdiri dari satu badan atau lebih.¹

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perkembangan suatu Negara baik Negara maju maupun Negara berkembang. Kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan ekonomi Negara tersebut. Apabila perekonomian suatu Negara lemah, maka Negara tersebut bisa mengalamikrisis ekonomi yang berdampak pada meningkatnya inflasi dan menurunnya pendapatan masyarakat.²

¹Sumaryo Adolf, SH, *Hukum EkonomiInternasional*, Universitas Indonesia (UI;PRESS Jakarta,1990) h.105.

²Suherman, Ade Maman., *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002).h.43

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk memperkuat perekonomian suatu negara dapat dilakukan dengan memperkuat dan memajukan industri serta perdagangan. Pelaksanaan kegiatan ini pada hakikatnya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor baik barang maupun jasa, yang menyebabkan adanya hubungan antar warga Negara yang berlainan Negara. Hubungan ini dapat berlangsung apabila semua aspek yang berkaitan, dengan hubungan ini dapat diakomodasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional.

Untuk melindungi kepentingan ekonominya, Indonesia sebagai Negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, utamanya dari Negara maju, hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri maupun luar negeri walaupun tak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai Negara berkembang juga butuh bantuan dari Negara-negara maju.³

Pada saat sekarang ini salah satu pelanggaran hukum di bidang ekspor impor barang yang disebut secara populer dengan istilah “penyeludupan”. Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawas atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut. Masalah penyeludupan merupakan hal yang selalu menarik perhatian di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dewasa ini banyak terjadi penyeludupan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakang mereka melakukan penyeludupan adalah untuk

³Rambe Manalu, Paingo, *Hukum Dagang Internasional*, (Novindo Pustaka Mandiri Jakarta 2000), h. 54.

menghindari tarif dan pajak bea masuk dan keluar barang dan barang yang dilarang oleh pemerintah.

Menurut Andi hamzah penyeludupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan barang atau uang dari indonesia keluar negeri. Istilah penyeludupan, dalam bahasa belanda smuggle, yaitu dimana seseorang diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan dan mengeluarkan barang untuk menghindari dari bea cukai.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar masuk dari suatu Negara mematuhi ketentuan pabean. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean yaitu patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.⁴

Bea Cukai adalah suatu direktorat (instansi dibawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat bea cukai berada di bawah kementerian keuangan.⁵ Jadi lembaga inilah yang berwenang dalam pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia.

Bea cukai dumai merupakan salah satu dari banyaknya kantor bea cukai di Indonesia, Dumai merupakan daerah yang sangat strategis di Provinsi Riau untuk menjalankan kegiatan ekspor impor barang maupun jasa keluar dan kedalam wilayah Indonesia khususnya Provinsi Riau.

⁴Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan terhadap Pembangunan*, Cetakan II, (Sinar Grafika Jakarta, 1992) h. 34

⁵Bambang Sumedi, *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, (Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Jakarta 2009) h. 8.

Di Dumai banyak terdapat pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal besar yang digunakan sebagai sarana angkutan barang atau jasa baik domestik maupun internasional. Pelabuhan-pelabuhan tersebut dibawah pengawasan bea cukai dumai

1. Pelindo (Pelabuhan Indonesia)
2. Pelabuhan Khusus (Pelsus)
3. Kawasan Industri Dumai (KID)
4. Pertamina
5. Tripatra/Parta Group, dan
6. Pelabuhan Rakyat

Pelabuhan-pelabuhan diatas berada dibawah pengawasan bea cukai dumai, dimana diperairan dumai sering kali terjadi pelanggaran atau penyeludupan.

Pada saat sekarang ini salah satu pelanggaran hukum dibidang ekspor impor barang yang disebut secara populer dengan istilah “penyeludupan”.

Penyeludupan adalah penyeludupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran atau pemasukkan barang atau uang dari Indonesia keluar negeri.⁶

Penyeludupan terbagi 2 yaitu :

1. Penyeludupan administratif

Penyelundupan administrasi adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuaianya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.

2. Penyeludupan fisik

⁶Andi Hamzah, *Kriminologi dan Bentuk Kejahatan*, (PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995), h. 2.

Penyeludupan fisik diartikan sebagai tindakan pemasukan barang dari luar negeri ke Indonesia atau pengeluaran barang dari Indonesia ke luar negeri penyelundupan barang tanpa di lindungi dokumen.

Penulis menekankan bahwa dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji pengawasan bea dan cukai terhadap penyeludupan administratif saja agar permasalahan tidak terlalu meluas.

Penyeludupan administratif ini berupadokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya barang masuk tidak cocok denngan jumlah barang yang diangkut (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar.

Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawas atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut. Masalah penyeludupan merupakan hal yang selalu menarik perhatian diIndonesia, terutama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah tentang bea masuk dan keluar terhadap barang-barang impor atau ekspor dipabean dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan aspek kepabeanan Indonesia,maka diberlakukanlah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 1 Huruf (d)

Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyaifungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya

fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai..

Secara sederhana, pengawasan dapat dijelaskan sebagai tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kesalahan dari suatu standarisasi yang telah ditetapkan.⁷

Masalah yang berkenaan dengan pengaturan bea masuk dan penyeludupan barang-barang impor pada pabean Indonesia merupakan hal yang yang agak rumit dan sangat memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah, karena apabila pengaturan terhadap kepabeanan ini dilakukan dengan kurang hati-hati tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, maka sudah tentu akan mendatangkan kerugian bagi Negara Indonesia. Hal ini bisa mengakibatkan pemasukan devisa Negara dari kepabeanan akan menurun dan dapat merugikan negara.

Pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksaan berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan. Yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan dirjen maupun lain sebagainya.

Pengawasan bea cukai adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran di bidang pabean. Pengawasan yang efektif memungkinkan bea dan cukai mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyeludupan.⁸ Tetapi bea cukai juga mempunyai beberapa hambatan dalam pengawasan seperti, patokan pabean yang

⁷Siswanto Sunano, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 2006), h. 44.

⁸Hadimulyanto, R. Felix dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi dan Krantina*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997), h. 56.

ditetapkan oleh pelindo, pintu keluar masuknya barang yang belum ditetapkan serta kurangnya armada yang melakukan patroli.

Peran bea cukai sangat diperlukan oleh Negara Indonesia supaya tidak menimbulkan kerugian bagi Negara dari kegiatan impor dan ekspor dan juga melindungi industri dalam negeri.

Pejabat yang bertugas dikantor bea dan cukai di negara Indonesia khususnya kota Dumai dimana penulis melakukan penelitian ini, apakah ketentuan-ketentuan yang sudah ada ini telah dijalankan dengan semestinya serta pengawasan yang dilakukan sudah efektif. Apalagi wilayah dumai akan diterapkan sebagai daerah *Free Trade Zone* (daerah perdagangan bebas).

Disinilah peran bea dan cukai diuji kinerjanya dalam mengatasi penyeludupan atau penyelewengan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam kegiatan keluar masuknya barang dari wilayah Indonesia khususnya Dumai.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka jelaslah, pengawasan serta penerapan undang-undang, ketentuan barang-barang impor dan ekspor serta pengawasan terhadap penyeludupan pada kepabeanan Indonesia khususnya dumai tidaklah mudah seperti yang dibayangkan , maka fenomena inilah yang membuat penulis memilih judul **“Pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai terhadap Penyeludupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang hendak diteliti, yang menjadi pokok permasalahan adalah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyeludupan

barangdan mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya pada diri penulis, maka penulis hanya melakukan penelitian di kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai terhadap penyeludupan barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengawasan Kantor Bea dan Cukai Dumai Tipe A terhadap penyeludupan barang di Dumai?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan kantor bea dan cukai Tipe A Kota dumai terhadap penyeludupan barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan kantor bea dan cukai Tipe A kota dumai terhadap penyeludupan barang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis untuk mengetahui tata cara pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai dalam pemberantasan penyeludupan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi menjaga perekonomian dalam negeri.

2. Bagi masyarakat agar ikut melakukan pengawasan dalam mencegah terjadinya penyeludupan yang terjadi demi menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri khususnya kota Dumai dimana penulis melakukan penelitian.
3. Bagi pihak bea dan cukai sebagai instansi dimana penulis melakukan penelitian agar lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam membrantas penyudupan demi menjaga perekonomian dalam negeri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dan ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini bersifat sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menggambarkan dengan jelas tentang proses Pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyeludupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah kantor bea dan cukai Tipe A Kota Dumai yang ber alamat di Jalan Datuk Laksamana RT 12RW 04 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di daerah ini karena ditinjau dari segi kantor bea dan cukai Dumai merupakan salah satu pusat pengawasan beberapa pelabuhan antar negara sehingga banyak timbul pelanggaran-pelanggaran di bidang pabean yang berupa penyelundupan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, (benda hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau petugas yang bekerja di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai yang berjumlah 101 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰ Karena jumlah populasi yang banyak maka penulis mengambil 25 % dari populasi sebanyak 25 orang yang bekerja di kantor bea cukaidan untuk memperkuat data yang diperoleh penulis mewawancarai tokoh masyarakat yang mengetahui tentang bea cukai sebanyak 5 orang dengan menggunakan tehnik purposive sampling yaitu sampel yang diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan sebagai criteria harus dipenuhi sebagai sampel.¹¹

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara metode pengumpulan data/ instrument peneliti dengan observasi di lapangan dengan cara wawancara dan angket.

b. Data sekunder

⁹ Bambang Suggono, SH., MS, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002) , h 118.

¹⁰ *Ibid*, h. 119.

¹¹ P. Joko Subagyo, SH. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h. 31.

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan yang berkaitan dengan bea dan cukai serta masalah ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Data sekunder didapat dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum lainnya. Bahan tersier yaitu tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari bahan media masa dan elektronik, Koran dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara pengamatan langsung ke kantor bea dan cukai Tipe A Kota Dumai.
- b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹²
- c. Angket

Angket pada penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang bersifat terbuka yang ditujukan secara tertulis dan disebarkan kepada responden.

- d. Kajian pustaka, yaitu penulis mengambil kutipan dari membaca literatur-literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti demi mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

¹² Burhan Ashshofa, SH, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2007), h. 95.

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, yaitu data yang diperoleh dari wawancara diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah menurut jenisnya. Setelah itu peneliti sajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah pokok, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Setelah penyusunan dan pengelompokkan data serta keterangan dilakukan, untuk selanjutnya data dan keterangan tersebut akan diolah dan dianalisa untuk mengambil kesimpulan deduktif, yaitu mencari kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga dapat menjawab apa yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mempelajari setiap keterangan dari populasi sebagai kesatuan serta data atau bahan yang bersifat kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji sesuatu permasalahan dalam kasus-kasus terbatas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub-sub bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian ,metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.

Bab ini terdiri dari :keadaan geografis kota dumai, Pemerintahan kota dumai, penduduk dumai, gambaran umum bea cukai dumai sertastruktur organisasi kantor bea cukai tipe A kota Dumai.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini terdiri dari :pengertian pengawasan, pengertian pengawasan internal, pengertian pengawasan eksternal, dan pengertian pengawasan pabean.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji tentang: Pengawasan Kantor Bea dan Cukai TIPE A Kota Dumai terhadap penyeludupan barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.Faktor penghambat pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe A kota Dumai terhadap penyeludupan barang di Dumai, dan upaya yang dilakukan oleh bea cukai dalam mencegah terjadinya penyeludupan di Kota Dumai

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Keadaan Geografis

Kota Dumai terletak pada posisi antara 1°23'-1°24'-23 Bujur Timur dan 101°23'-27-101°28'-13 Lintang Utara. Kota Dumai mempunyai luas 1.872,38 km² (kilometer persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Mandau dan kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis .
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tanah Putih dan kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah dibagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah Podsolik merah kuning dari batuan endapan dan Alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kota Dumai terdapat 16 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Masjid dan Sungai Senepi merupakan sungai yang terpanjang diantara 16 buah sungai tersebut.

Kota Dumai memiliki 16 sungai besar dan kecil dengan total panjang keseluruhannya 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng $0 < 3\%$, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°C - 34°C dan terdapat dua musim yaitu hujan dan kemarau. Jumlah hujan pada tahun 2012 tercatat 142 hari dengan curah hujan sebesar 2.189,9 mm.

2. Pemerintahan Kota Dumai

Pembentukan pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tanggal 20 April 1999. Wilayah administrasi pemerintahan ini terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa. Tahun 2001 dimekarkan menjadi 7 kecamatan dan 32 Kelurahan, hingga saat ini banyak terjadi pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai demi kesejahteraan masyarakatnya. Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya ada 3 perangkat staf pemerintahan yang berperan besar membantu tugas-tugas Walikota, yaitu:

- a. Sekretaris Daerah (SEKDA)
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan
- c. Badan Pengawas

Yang masing-masing tugasnya dibawah pengawasan Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

3. Penduduk Kota Dumai

Masalah penduduk dikota dumai sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tak terkendali akan sulit dicapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup. Penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Penduduk Kota Dumai berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2005 berjumlah 173.188 jiwa dengan laju pertumbuhan pertahun 3,16%. Selanjutnya hasil pengolahan P4B yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pada tahun 2012 berjumlah 45.182 dengan jumlah penduduk 214.648 jiwa yang terdiri dari 113.789 jiwa penduduk laki-laki dan 100.859 jiwa penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk per kilometer persegi menurut kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan Dumai Timur menempati urutan tertinggi yaitu 1.385,34 jiwa per kilometer persegi, di ikuti oleh kecamatan Dumai Barat 666,46 jiwa per kilometer persegi.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan

penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa di ikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

B. Gambaran Umum Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai dan Pelabuhan-Pelabuhan Dibawah Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai

Dari gambaran umum Kota Dumai maka terlihatlah bahwa Dumai merupakan daerah yang sangat strategis di Provinsi Riau untuk menjalankan kegiatan ekspor impor barang maupun jasa keluar dan kedalam wilayah Indonesia khususnya Provinsi Riau.

Di Dumai banyak terdapat pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal besar yang digunakan sebagai sarana angkutan barang atau jasa baik domestik maupun internasional.

Pelabuhan-pelabuhan tersebut dibawah pengawasan bea cukai dan pelindo Kota Dumai cukup banyak, pelabuhan-pelabuhan tersebut antara lain :

1. Pelindo (Pelabuhan Indonesia)
2. Pelabuhan Khusus (Pelsus)
3. Kawasan Industri Dumai (KID)
4. Pertamina
5. Tripatra / Parta Group, dan
6. Pelabuhan Rakyat

Setiap pelabuhan tersebut bea dan cukai Tipe A Kota Dumai mendirikan pos-pos untuk menjaga dan memeriksa arus barang yang masuk dan keluar dari Dumai. Pada setiap pos-pos tersebut dilakukan penjagaan oleh beberapa

anggota dari pejabat bea dan cukai yang ditugaskan oleh kantor bea dan cukai kota Dumai menurut tugasnya masing-masing.

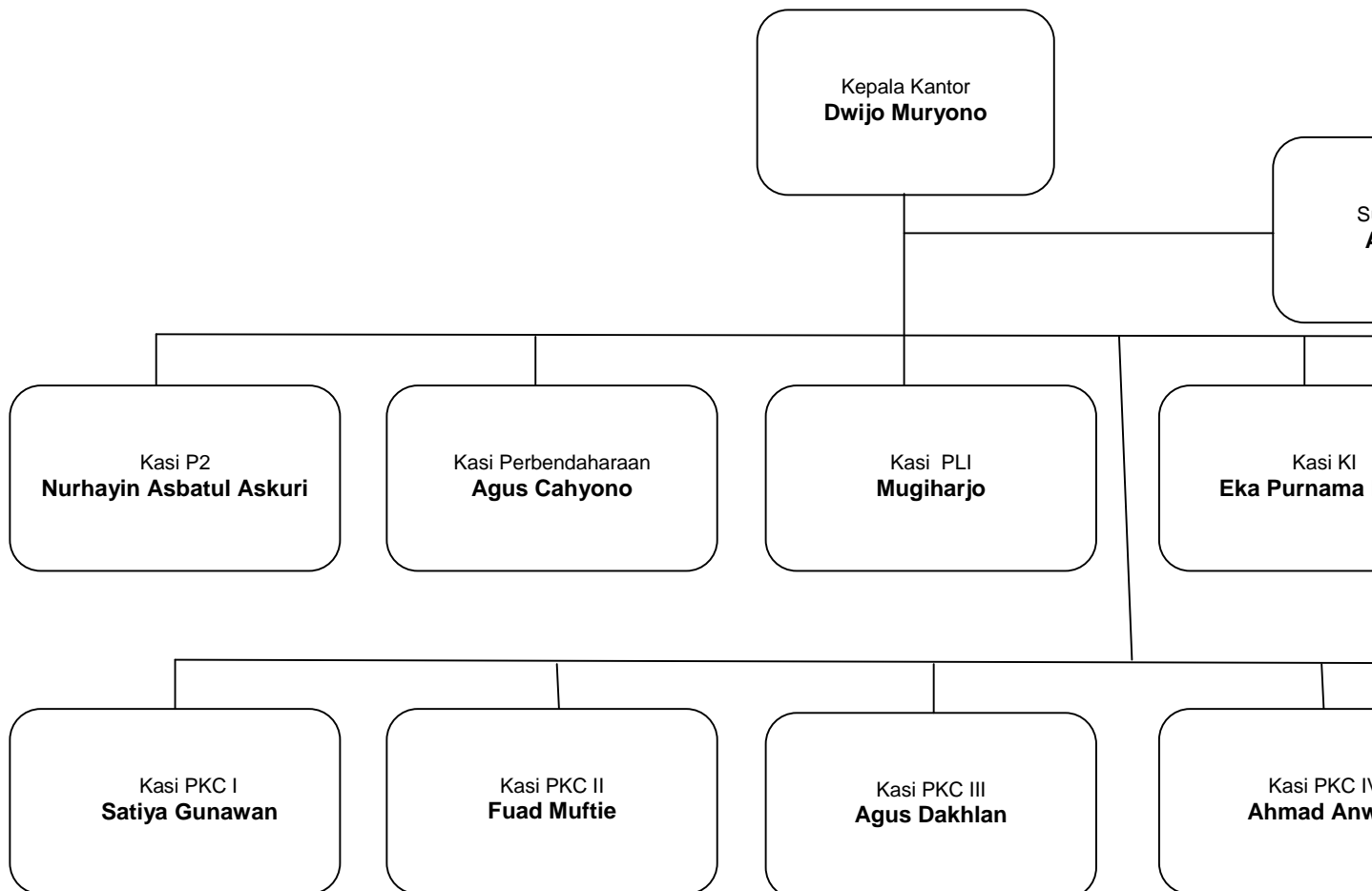
Pelabuhan Dumai merupakan salah satu Pelabuhan Utama di Propinsi Riau mempunyai letak geografis yang menguntungkan karena merupakan pelabuhan alam yang dilindungi oleh beberapa pulau antara lain Pulau Rupat , Pulau Payung dan Pulau Rampang sehingga mempunyai perairan yang cukup dalam dan tenang dari terpaan ombak serta iklim yang cukup sejuk sepanjang tahun. Untuk Hidrografi, sepanjang dermaga pelabuhan tidak terdapat endapan lumpur, dikarenakan pelabuhan adalah pelabuhan alam dengan kedalaman 8-12 MLWS dan untuk pasang surut pada bulan Mei pasang tertinggi rata-rata 28 Dm dan pasang terendah

Untuk pelabuhan rakyat, tidak semua dapat didirikan pos-pos penjagaan bea dan cukai, dikarenakan banyaknya pelabuhan rakyat tersebut yang didirikan oleh rakyat setempat yang berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi, pelabuhan rakyat ini juga dilakukan pengawasan oleh pihak bea dan cukai. Maksud dari pelabuhan rakyat ini didirikan oleh rakyat untuk menambatkan perahu-perahu mereka yang digunakan untuk melaut.

Sangat disayangkan bahwa sebanyak itu pelabuhan yang terdapat di Kota Dumai hanya diawasi oleh bea cukai yang pegawainya hanya 101 orang. Tidak semua dari pegawai bea cukai ini berada dilapangan, ada juga yang harus bertugas khusus dikantor dan memang sesekali melakukan pengawasan secara langsung serta melakukan pengawasan secara mendadak untuk mengetahui kondisi lapangan.

Supaya tidak terjadi penyeludupan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka bea cukai juga bekerja sama dengan TNI-AL, POLAIRUD dan pihak-pihak yang berwenang lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan diwilayah perairan Dumai khususnya pelabuhan-pelabuhan kecil yang jauh dari pengawasan bea dan cukai.

Struktur Organisasi Kantor Bea Cukai Tipe A kota Dumai



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*³

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta

¹Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia, jakarta 1986), h. 2.

²Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, Jakarta 2004), h. 127

³*ibid*

“Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.⁴

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. ⁵

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

⁴ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981), h. 80

⁵ *Ibid*, hal .97

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau

“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”⁶

Sementara itu, dari segi hukumtata negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,

⁶ Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1998), h..39.

dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

B. Tujuan pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahu kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan yaitu :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru.

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan.
6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;⁷

C. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Teknik pengawasan menurut Manullang sebagai berikut:

1. Peninjauan pribadi

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

⁷ *Ibid*, h, 49

2. Pengawasan melalui laporan lisan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan.

3. Pengawasan melalui laporan tertulis

Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan.

4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecualian atau control by exception. Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa

Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.

4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.

13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.⁸

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai

Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

1. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

⁸Sukarno .*Dasar-Dasar Managemen*., (Jakarta, 1992), hal.105.

5. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.⁹

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu

⁹*Ibid*, h. 67

pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Controlling atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan yang modern fungsi control ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: *“the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plans”*.

Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hari Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: “pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan

tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”¹⁰

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan;
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata;
- d. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan
- e. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

D. Manfaat Pengawasan

Bila fungsi wasdal dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat berupa:

¹⁰M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995), h.18.

1. Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilaukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumberdaya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi wasdal akan meningkatkan efisiensi kegiatan program.
2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien.
4. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan.
5. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan.

Pengawasan non fungsional. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh badan-badan yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan seperti DPR, BPK, KPK, dan lain-lain.

D. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. .

Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada pejabat dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan membawa dampak buruk pada kinerja organisasi.

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini:

1. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional
2. Keandalan Laporan keuangan
3. Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

Manfaat pengawasan internal

1. Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang menjadi suatu media menuju akhir, bukan berarti akhir itu sendiri;
2. Pengawasan internal dipengaruhi oleh personil. Hal tersebut bukanlah hanya suatu kebijakan yang berbentuk manual dan format tertulis, tetapi merupakan sekelompok individu pada tiap tingkat organisasi.
3. Pengawasan internal dapat diharapkan untuk memberikan kepastian yang sesuai, bukan kepastian yang absolut kepada keseluruhan tingkat manajemen.
4. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya sasaran yang terpisah-pisah tetapi juga untuk keseluruhan tujuan organisasi.

E. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. pengawasan ini juga disebut pengawasan secara langsung kelapangan.

Pengawasan merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang

diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pengawas dengan yang diawasi.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan eksternal adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan

1. mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
5. Untuk mencari jalan keluar,bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.¹¹

¹¹*ibid*

F. Pengawasan Pabean

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan dan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar semua organisasi itu dapat mencapai tujuannya.¹²

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dengan kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.¹³

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KMK.01/1998 tanggal 04 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal bea dan Cukai, titik berat fungsi pengawasan berada pada kantor pelayanan namun apabila dilihat dari ketersediaanya informasi dan akses ke arah informasi, kantor pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan dalam pengertian *day-to-day-operation*.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi ketentuan pabean. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal,

¹²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) , h.58.

¹³*Ibid.*

barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegehan dan lain-lain.

Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean. pengawasan bea cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyeludupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik dan audit pasca impor. Disamping tiga kegiatan itu, menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan bea cukai untuk mencegah penyeludupan.

Petunjuk pengawasan pelaksanaan penyeludupan dibidang pabean terdapat dalam pasal 1 huruf d dalam peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010.

Perlu diperhatikan juga dalam pengaturan peraturan ini adalah pejabat yang bertugas dikantor bea dan cukai di wilayah Indonesia Khususnya diwilayah Dumai dimana penulis melakukan penelitian ini, apakah ketentuan-ketentuan yang sudah ada ini telah dijalankan dengan semestinya serta pengawasan yang dilakukan sudah efektif. Apalagi wilayah Dumai akan diterapkan sebagai daerah *Free Trade zone* (daerah perdagangan Bebas). Disinilah peran bea cukai diuji kinerjanya dalam mengatasi penyeludupan atau penyelewengan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam kegiatan keluar masuknya barang dari wilayah Indonesia khususnya Dumai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Kantor Bea dan Cukai tipe A kota Dumai Terhadap Penyeludupan barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/bc/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan.¹

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah digariskan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

¹ Muhammad Sood, SH, MH, Hukum Perdagangan Internasional, (PT Raja Grafindo persada, Jakarta 2011), h. 48

Menurut Harold Koonz,dkk, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah :

Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.²

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada pejabat dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan membawa dampak buruk pada kinerja organisasi.

² Sukarno K. *Dasar-Dasar Managemen*, Miswar, (Jakarta, 1992), h.105.

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini:

1. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional
2. Keandalan Laporan keuangan
3. Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku ³

Tabel 1

Tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan oleh direktur jenderal bea dan cukai terhadap bawahan atau personel bea cukai

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Baik/bagus | 20 | 80% |
| 2. | Kurang baik | 5 | 20% |
| 3. | Tidak baik | 0 | 0% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui tentang pengawasan yang dilakukan oleh direktur jenderal bea dan cukai terhadap bawahan atau personel bea cukai adalah 20 reponden atau sebesar 80% mengatakan baik dan sebanyak 5 responden atau sebesar 20% mengatakan kurang baik dan kemudian yang mengatakan tidak baik 0 dapat disimpulkan bahwa tentang pengawasan yang dilakukan oleh direktur jenderal bea dan cukai terhadap bawahan atau personel bea cukai. dikatakan berjalan secara efektif.

³ *Ibid*, h. 128

Menurut bapak rojali salah satu responden mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan bea dan cukai belum efektif dikarenakan masih banyak pejabat bea cukai masih sering terlambat datang ke kantor.⁴

Tabel 2

Tanggapan responden tentang adanya sanksi dari atasan apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | ada | 25 | 100% |
| 2. | Tidak ada | 0 | 0% |
| 3. | Kurang tau | 0 | 0% |
| | jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden apakah ada sanksi dari atasan apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal. 25 dari responden atau sebanyak 100% mengatakan adanya sanksi apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal

Menurut bapak imam salah satu responden mengatakan bahwa mungkin ada sanksi dari atasan apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal. Tetapi saya tidak pernah mendengar kalau pihak dari bea cukai diberi sanksi.

⁴ Rojali , *Wawancara*, Dumai 15agustus 2013

Tabel 3

Sanksi yang biasanya diberikan apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Teguran | 25 | 100% |
| 2. | denda | 0 | 0% |
| 3 | Skors | 0 | 0% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Data olahan angket

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden apakah sanksi yang biasa diberikan dari atasan apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal. 25 dari responden atau sebanyak 100% mengatakan sanksi yang didapat yaitu berupa teguran apabila bawahan tidak melakukan tugasnya secara optimal.

Menurut agus sanksi yang didapat oleh bea cukai dari atasanya apabila pejabat bea cukai tidak melakukan tugasnya berupa teguran saja.⁵

1. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Sering juga disebut dengan pengawsan terhadap objek pengawasan secara langsung.

Pengawasan eksternal adalah pangawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung

⁵ Agus, *Wawancara*, Dumai 14 Agustus 2013

melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.⁶

Tabel 4

**Tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan dilapangan
atau di perairan dumai**

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | sulit | 10 | 40% |
| 2. | Lumayan sulit | 11 | 44% |
| 3 | Tidak sulit | 4 | 12% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bea dan cukai dumai diperairan dumai sebanyak 10 orang atau sebanyak 40% mengatakan sulit dan sebanyak 11 orang atau 44% mengatakan lumayan sulit. Dan yang mengatakan tidak sulit sebanyak 4 orang atau 12%. dapat disimpulkan bahwa tentang pengawasan yang dilakukan oleh bea dan cukai diperairan dumai yaitu sebanyak 11 atau sebanyak 40% mengatak lumayan sulit dalam melakukan pengawasan.

⁶ *Ibid.* h. 112

Menurut ramli salah satu nelayan dumai menyatakan memang sulit melakukan pengawasan di laut dumai, ini disebabkan oleh banyak nay pelabuhan yang ada didumai.⁷

Peran bea dan cukai kota Dumai dalam mengatur bea masuk barang-barang impor dan pengawasan terhadap penyeludupan barang di Dumai sangat vital, Karena banyaknya pelabuhan dan luas wilayah perairan yang berbatasan dengan Negara tetangga yang harus di awasi dan kurangnya personel yang ada. Pengawasan yang dilakukan harus secara selektif demi kelancaran arus barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia khususnya Dumai.

Tabel .5

Tanggapan responden berapa kali patroli dilakukan oleh bea dan cukai kota Dumai

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Setiap hari | 15 | 30% |
| 2. | Per 3 bulan sekali | 20 | 40% |
| 3 | Per 6 bulan sekali | 15 | 30% |
| | Jumlah | 50 | 100% |

Data olahan angket

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa patroli yang dilakukan per hari hanya 15 reponden atau sebesar 30% dan patroli yang dilakukan per 3 bulan sebanyak 20 responden atau sebesar 40% dan kemudian yang per 6 bulan sekali sebanyak 15 responden 30%. dapat

⁷ Ramli, *Wawancara*, Dumai 14 Agustus 2013

disimpulkan bahwa patoli sering dilakukan adalah per 3 bulan sekali yaitu sekitar 40%.

Menurut ramli salah satu nelayan dumai menyatakan seharusnya patroli dilakukan secara rutin yaitu dilakukan setiap hari agar pelanggaran dilaut dumai.⁸

Tabel 6

Tanggapan responden tentang banyaknya pelanggaran di laut dumai

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Banyak | 13 | 52% |
| 2. | Lumayan banyak | 11 | 44% |
| 3 | Tidak ada | 2 | 4% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden apakah banyak pelanggaran di laut dumai sebanyak 13 orang atau sebanyak 52% mengatakan banyak terjadi pelanggaran dan sebanyak 11 orang atau 44% mengatakan lumayan banyak. Dan yang mengatakan tidak ada sebanyak 2 orang atau 4%. dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggaran di laut dumai yaitu sebanyak 13 atau sebanyak 52% mengataka banyak pelanggaran.

Menurut herman pemuda yang profesinya sebagai nelayan mengatakan bahwa memang banyak pelanggran atau penyeludupan di daerah pabean dumai, itu disebabkan kurangnya pengawasan dari kantor bea cukai dumai. Pernyataan ini diperkuat oleh bapak ramli.⁹

⁸ *ibid*

⁹ Herman, dan Ramli, *Wawancara*, Dumai, 15 Agustus 2013

B. Faktor Penghambat Pengawasan Kantor Bea dan Cukai tipe A Kota Dumai Terhadap Penyeludupan Barang Didumai

Dalam penerapan ketentuan peraturan direktu jenderal bea dan cukai nomor P-53/bc/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai dumai memiliki faktor penghambat dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai kota dumai, antara lain:

1. Batas-batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo (pelabuhan Indonesia).

Dalam penetapan batas-batas pabean dikota dumai yang ditetapkan oleh pelindo agak rumit dilakukan dikarenakan banyaknya pelabuhan yang berada dikota dumai, baik dibawah pengawasan pelindo dan pihak bea cukai maupun yang yang tidak dibawah pengawasan. Ini juga dapat dilihat dari letak geografis kota dumai yang tidak hanya berbatasan dengan wilayah perairan saja, tetapi juga berbatasan dengan wilayah daratan.

Kendala yang dihadapi oleh pejabat pabean dumai ini sangat signifikan, dikarenakan bukan hanya wilayah perbatasan saja akan tetapi jumlah personel pejabat pabean juga yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pejabat pabea dalam menerapkan ketentuan undang-undang tentang kepabeanan, ini dikarenakan didumai terdapat pelabuhan terbesar diprovinsi riau untuk melakukan kegiatan ekspor impor.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

Tabel 7

Tanggapan responden tentang batas-batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Jelas | 3 | 12% |
| 2. | Kurang jelas | 22 | 88% |
| 3. | Belum jelas | 0 | 0% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa batas-batas pabean yang tetapkan oleh pelabuhan Indonesia 3 reponden atau sebesar 12% menyatakan jelas dan sebanyak 22 responden atau sebesar 88% menyatakan kurang jelas dan yang menyatakan tidak jelas 0 responden dapat disimpulkan bahwa batas-batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo kurang jelas yaitu sekitar 88%.

Menurut rojali responden dari masyarakat batas-batas pabean masih belum jelas dikarenakan banyaknya pelabuhan yang ada didumai.¹¹

Tabel 8

Tanggapan responden dalam mengawasi pelabuhan yang batas-batas pabeannya kurang jelas

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | sulit | 20 | 80% |
| 2. | Lumayan sulit | 5 | 20% |
| 3. | Tidak sulit | 0 | 0% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

¹¹ Rojali, *Wawancara*, (dumai .2013)

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa mengawasi perairan yang batas-batas pabean yang kurang jelas 20 responden atau sebesar 80% menyatakan sulit dan sebanyak 5 responden atau sebesar 20% menyatakan lumayan sulit dan yang menyatakan sulit 0. dapat disimpulkan bahwa batas-batas pabean yang kurang jelas yang ditetapkan oleh pelindo mengakibatkan sulit dalam pengawasan yaitu sekitar 80%

Menurut agus batas-batas pabean yang belum jelas mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai tidak optimal.¹²

2. Pintu masuk dan keluar barang yang belum menjadi patokan oleh Pelindo (Pelabuhan Indonesia)

Dalam rangka memberikan pelayanan pengawasan terhadap barang-barang impor dan ekspor yang dilakukan oleh bea cukai kota dumai, maka pelindo yang bekerja sama dengan pejabat bea cukai hendaklah memberikan kepastian tentang batas-batas pelabuhan tertentu dimana persentase kegiatan ekspor impor yang tinggi.

Pada dasarnya pelindo bekerja sama dengan bea cukai dalam penyediaan sarana tempat berlabuhnya kapal (pelabuhan) yang melakukan bongkar muat barang harus memberikan spesifikasi atau batasan-batasan pasti terhadap pintu masuk yang digunakan untuk arus lalu lintas barang. Kendala lain yang dihadapi oleh pejabat bea cukai dumai adalah banyaknya pelabuhan dibawah pengawasan bea cukai kota dumai yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor barang

¹² *Ibid*

Tabel 9

Tanggapan responden tentang batas-batas pintu masuk dan keluarnya barang dari Indonesia.

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Jelas | 10 | 40% |
| 2 | Kurang jelas | 13 | 44% |
| 3 | Belum jelas | 2 | 6% |
| | jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa batas-batas pintu masuk dan keluarnya barang ke Indonesia 10 reponden atau sebesar 40% menyatakan jelas dan sebanyak 13 responden atau sebesar 40% menyatakan kurang jelas dan yang menyatakan tidak jelas 2 responden atau sebesar 6% dapat disimpulkan bahwa batas-batas pintu masuk dan keluarnya barang Indonesia kurang jelas yaitu sekitar 44%.

Menurut Imam bahwa pintu keluar dan masuknya barang belum menjadi patokan, dikarenakan banyaknya pelabuhan yang belum diaawasi.¹³

Tabel 10

Tanggapan responden dalam mengawasi perairan yang pintu masuk dan keluarnya barang belum jelas

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|------------------------|------------------|------------|
| 1. | Sulit dalam pengawasan | 13 | 52% |
| 2. | Lumayan sulit | 9 | 36% |
| 3. | Tidak sulit | 3 | 12% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

¹³ *Ibid*

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa mengawasi perairan yang pintu masuk dan keluarnya barang dari daerah pabean sebanyak 13 orang atau sebesar 52% menyatakan sulit dalam pengawasan dan 9 reponden atau sebesar 36% menyatakan lumayan sulit dan sebanyak 3 responden atau sebesar 12% menyatakan tidak sulit. dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden dalam mengawasi perairan yang pintu masuk dan keluarnya barang belum jelas ditetapkan oleh pelindo mengakibatkan sulit dalam pengawasan yaitu sekitar 52%

Menurut dalam mengawasi perairan yang pintu masuk dan keluarnya barang belum jelas mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai tidak optimal.¹⁴

3. Kurangnya armada patroli yang ada dikantor bea cukai tipe A kota dumai dalam melakukan pengawasan terhadap perairan dan pelabuhan-pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor impor

Kurangnya personel serta armada patroli yang bertugas dikantor bea cukai dumai dalam melakukan pengawasan terhadap perairan dan pelabuhan-pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor impor juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai.

Dengan kondisi geografis sedemikian rupa, ditambah lagi dengan kurangnya armada patrol yang memadai, menjadikan dumai sebagai titik rawan penyeludupan. Disinilah dapat dilihat kurang optimalnya pengawasan terhadap penyeludupan barang dan penerapan peraturan direktur jenderal

¹⁴ Imam, *Wawancara*, Dumai 14 Agustus 2013

Nomor P-53/BC/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai. di Dumai belum dapat dikatakan berjalan secara optimal.

Tabel 11

Tanggapan responden tentang jumlah pejabat bea cukai yang melakukan patroli

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | persentase |
|----|---------------------|------------------|------------|
| 1. | banyak | 10 | 40% |
| 2. | Kurang banyak | 14 | 56% |
| 3. | Tidak banyak | 1 | 4% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah pejabat bea cukai yang melakukan patroli 10 reponden atau sebesar 40% menyatakan banyak yang melakukan patroli dan sebanyak 14 responden atau sebesar 56% menyatakan kurang banyak dan yang menyatakan tidak banyak 1 responden atau sebesar 4% dapat disimpulkan bahwa jumlah pejabat bea cukai yang melakukan patroli kurang banyak yaitu sekitar 56%.

Menurut kasi penindakan dan pengawasan kantor bea cukai dumai yaitu bapak nurhaiyin asbatul askuri menyatakan memang bea cukai dumai kekurangan armada patroli, jadi kami sedikit susah dalam melakukan pengawasan kepabeanan.¹⁵

¹⁵ Nurhaiyin Asbatul Askuri, *Wawancara*, Dumai, 16 Agustus 2013

Tabel 12

**Tanggapan responden banyaknya pelabuhan yang harus diawasi,
sementara armada patroli kurang**

| No | Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|----|------------------------|------------------|------------|
| 1. | Sulit dalam pengawasan | 13 | 52% |
| 2. | Lumayan sulit | 9 | 36% |
| 3. | Tidak sulit | 3 | 12% |
| | Jumlah | 25 | 100% |

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa banyaknya pelabuhan yang harus diawasi, sementara armada patroli kurang sebanyak 13 orang atau sebesar 52% menyatakan sulit dalam pengawasan dan 9 reponden atau sebesar 36% menyatakan lumayan sulit dan sebanyak 3 responden atau sebesar 12% menyatakan tidak sulit. dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden dalam mengawasi perairan yang pintu masuk dan keluarnya barang belum jelas ditetapkan oleh pelindo mengakibatkan sulit dalam pengawasan yaitu sekitar 52%

Menurut nurhaiyin asbatul askuri mengatakan banyaknya pelabuhan yang harus diawasi, sementara armada patroli kurang mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai belum optimal optimal.¹⁶

Dari uraian penulis lihat sebelumnya terlihat bahwa peran bea cukai kota dumai dalam menerapkan ketentuan peraraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai terhadap penyeludupan barang dikota dumai belum

¹⁶ *Ibid*

sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini bisa dikarenakan berbagai faktor penghambat dalam ketentuan yang berlaku di Dumai tentang kepabeanan.

Dilihat dari faktor-faktor diatas, koordinasi antara pihak bea cukai dengan pihak pelindo atau pihak terkait lainnya sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya penyeludupan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adapun jalan keluar dari faktor penghambat pengawasan bea cukai di Dumai terhadap penyeludupan barang yaitu :

1. Menentukan dengan jelas batas-batas pelabuhan- pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor impor di Dumai yang ditetapkan oleh pelindo (pelabuhan Indonesia).

Dalam penetapan batas-batas pabean di kota Dumai yang ditetapkan oleh pelindo agak rumit dilakukan dikarenakan banyaknya pelabuhan yang berada di kota Dumai, baik dibawah pengawasan pelindo dan pihak bea cukai maupun yang yang tidak dibawah pengawasan. Ini juga dapat dilihat dari letak geografis kota Dumai yang tidak hanya berbatasan dengan wilayah perairan saja, tetapi juga berbatasan dengan wilayah daratan. Jadi batas-batas pabean yang harus ditetapkan terlebih dahulu agar proses dalam pengawasan mudah dilakukan dan pengawasan yang efektif memungkinkan mengurangi terjadinya penyeludupan.

Kendala yang dihadapi oleh pejabat pabean di Dumai ini sangat signifikan, dikarenakan bukan hanya wilayah perbatasan saja akan tetapi jumlah personel pejabat pabean juga yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pejabat pabea dalam menerapkan ketentuan undang-undang tentang

kepabeanan, ini dikarenakan didumai terdapat pelabuhan terbesar diprovinsi riau untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

2. Menentukan pintu masuk dan keluarnya barang secara beraturan yang belum menjadi patokan oleh pelindo.

Dalam rangka memberikan pelayanan pengawasan terhadap barang-barang impor dan ekspor yang dilakukan oleh bea cukai kota dumai, maka pelindo yang bekerja sama dengan pejabat bea cukai hendaklah memberikan kepastian tentang batas-batas pelabuhan tertentu dimana persentase kegiatan ekspor impor yang tinggi. Pada dasarnya pelindo bekerja sama dengan bea cukai dalam penyediaan sarana tempat berlabuhnya kapal (pelabuhan) yang melakukan bongkar muat barang harus memberikan spesifikasi atau batasan-batasan pasti terhadap pintu masuk yang digunakan untuk arus lalu lintas barang. Kendala lain yang dihadapi oleh pejabat bea cukai dumai adalah banyaknya pelabuhan dibawah pengawasan bea cukai kota dumai yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor barang

3. Menambah kapal patroli dalam melakukan kegiatan patroli laut.

Kurangnya personel serta armada patroli yang bertugas dikantor bea cukai dumai dalam melakukan pengawasan terhadap perairan dan pelabuhan-pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor impor juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai. Dimana dalam hal ini pemerintah lebih harus mengawasi setiap kantor dan kekurangan kantor.

Dengan kondisi geografis sedemikian rupa, ditambah lagi dengan kurangnya armada patrol yang memadai, menjadikan Dumai sebagai titik rawan penyeludupan. Disinilah dapat dilihat kurang optimalnya pengawasan terhadap penyeludupan barang dan penerapan peraturan direktur jenderal Nomor P-53/BC/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai. di Dumai belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Dikarenakan kurangnya armada patroli menurut penulis Apabila armada patroli cukup untuk melakukan patroli mungkin akan mengurangi penyeludupan yang terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota Dumai terhadap penyeludupan barang berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai.

Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Petugas bea dan cukai yang meneliti dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah importer atau eksportir memberitahukan klasifikasi barang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

- a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pengawas dengan yang diawasi

Untuk dapat melaksanakan pengawasan diperlukan informasi yang mencakupi dan khusus untuk bea cukai yang diperlukan itu sebagian besar berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean yang diserahkan kepada bea cukai dikantor pelayanan. Dengan demikian kantor bea cukai tipe A kota Dumai mempunyai akses yang lebih besar untuk mencegah terjadinya penyeludupan administratif.

Pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai dumai terhadap penyeludupan belum dapat dilaksanakan secara optimal, ini dikarenakan kurangnya personel, armada pendukung dan koornasi dengan pihak pelindo sebagai instansi yang menyediakan tempat atau sarana berlabuhnya kapal (pelabuhan) untuk berlabuhnya kapal-kapal atau sarana pengangkut yang melakukan kegiatan ekspor impor.

1. Faktor penghambat pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota dumai terhadap penyeludupan barang

Dalam penerapan ketentuan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai dan pelaksanaan pengawasan terhadap penyeludupan barang memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

1. Batas-batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo.
2. Pintu masuk dan keluar barang yang belum menjadi patokan oleh pelindo.
3. Kurangnya personel armada yang ada dikantor bea cukai dumai.

B.Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan pokok-pokok uraian yang ada pada bagian terdahulu, antara lain:

1. Untuk bea cukai dumai dalam mengawasi penyeludupan dan pelanggaran pabean lainnya hendaklah meningkatkan kerja sama antara pihak yang terkait. Dan dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan sungguh-sungguh atau serius dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyeludupan
2. Untuk masyarakat terutama pada nelayan-nelayan setempat untuk sama-sama memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kepada kantor bea cukai.
3. Untuk pemerintah agar lebih mengawasi kinerja dari pejabat bea cukai dumai.

4. Untuk pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor hendaklah jujur dan sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, wawancara, Dumai : 14 Agustus 2013

Anwar Saiful., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Glora Madani Press, 2004.

Ashshofa Burhan, SH. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

Askuri Nurhayin, Wawancara, Dumai : 11 Juli 2012

Hadimulyanto, R Felix, Endar Sugiarto., *Pabean, Imigrasi Dan Krantina*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Hamzah Andi, *Kriminologi dan Bentuk Kejahatan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.

Herman, wawancara, Dumai : 15 Agustus 2013

Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.

P. Joko Subagyo, SH, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

Rambe Manalu, Paingo, *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2000.

Ramli, Wawancara, Dumai : 14 Agustus 2013

Rojali, Wawancara, Dumai : 15 Agustus 2013

Salindeho Jhon, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta : Sinar Grafika, 1998.

Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2007.

Sukarno, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 1992

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Sumaryo adolf SH, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Sumedi Bambang, *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Bea dan Cukai Jakarta: 2009.

Sunano Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah DiIndonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sutedi Adrian SH, MH, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.